

INDEPENDENSI AUDITOR BERBASIS KULTUR DAN FILSAFAT HERBERT BLUMMER

INDRIYA KALANA

Magister Sains Akuntansi STIESIA Surabaya

SUTJIPTO NGUMAR

IKHSAN BUDI R.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Independence in carrying out audits is the backbone of a professional auditor. Therefore, the auditor or public accountant is not justified to take side towards anyone. Culture can influence personal public accountants or auditors which will affect their attitude of independence. Cultural differences also influence the patterns of social interaction. Several studies in the field of accounting discussed the perception of auditor's independence from some parties which reflects the opportunity of arising differences in the understanding auditor independence in the communications room. Factors that could cause such differences include the understanding of culture and personal experience as the result of daily interactions.

This is qualitative research by translating/interpreting the word auditor independence as a unit of study (unit of analysis). Study (analysis) of the understanding of auditor independence is not limited to the definition of auditor independence based on the informant's perception alone, but it was developed to be understood on the influence of culture and social interaction which are owned by informants in this study. Excavation of subjectivity of the informants was carried out as far as possible in accordance with the basic theoretical foundation of Herbert Blummer which is "situating" meaning in social interaction.

Having carried out a qualitative research process, it appeared a gap between the theories of independence that had been granted in education with the real conditions in the field of practice. This gap was obtained by the contact or interviews with informants who are used as source of data in this study. This study implied the need for adjustment of the regulator to address the conditions that demand auditor's tolerance as a result of the influence of culture and social interaction.

Keywords: *Independence of The Auditor, Culture, Symbolic Interactions, Herbert Blummer Theory, Qualitative Research*

1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Independensi dalam melaksanakan pengauditan merupakan tulang punggung auditor profesional dan harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor atau akuntan publik yang paling penting. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan

pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Christiawan, 2002). Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen.

Belakangan ini kualitas audit para auditor independen semakin banyak dipertanyakan oleh masyarakat mengingat banyaknya terjadi skandal yang melibatkan akuntan publik dan auditor baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Skandal di luar negeri yang cukup menarik perhatian adalah kasus Enron Corporation (Trisnaningsih, 2007). Menurut Santoso (2002) kepailitan Enron ini salah satunya dikarenakan KAP Arthur Anderson memberikan dua jasa sekaligus, yaitu sebagai auditor dan konsultan bisnis. Sementara itu di Indonesia juga terdapat fenomena kasus independensi auditor yang cukup menarik perhatian yaitu kasus audit PT. Telkom. Pada kasus yang melibatkan KAP “Eddy Pianto dan Rekan” ini, laporan keuangan auditan PT. Telkom yang terdaftar dalam pasar modal Amerika Serikat ditolak oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC – pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat) sehingga mengharuskan PT. Telkom melakukan audit ulang dengan KAP yang lain. Menurut Alim, dkk (2007) hal tersebut bisa saja terkait dengan kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor masih diragukan oleh SEC, dimana kompetensi dan independensi merupakan dua karakteristik sekaligus yang harus dimiliki oleh auditor.

Fenomena-fenomena kasus baik di dalam negeri maupun luar negeri tersebut telah menjadikan profesi auditor sebagai sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pandangan masyarakat, saat ini bobot independensi auditor telah berkurang. Pada akhirnya, kredibilitas auditor pun semakin dipertanyakan (Alim dkk, 2007).

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh auditor untuk menjaga kredibilitasnya. Pentingnya independensi bagi auditor dalam menjalani profesinya menjadikan independensi banyak dijadikan topik penelitian. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi independensi

(Kustono,2003; Bakar, dkk, 2005; Francis, 2006; Purnamasari, 2006; Kasidi, 2007; Suryaningtias, 2007; Amilin, 2008; Salehi, 2009a; Salehi, 2009b), pengaruh independensi terhadap berbagai hal (Alim, dkk, 2007; Trisnaningsih, 2007; Purba, 2009; Singgih, 2010) maupun pengembangan pengetahuan berkaitan dengan independensi (Ahlawat dan Lowe, 2004; Brandon, dkk, 2004; Janie, 2004; Amani dan Sulardi, 2005; Moore, dkk, 2006).

Kultur memiliki beberapa pengertian. Bagranoff, et. al. (1994) memaparkan bahwa bagi beberapa orang, kultur berarti perbaikan atau perkembangan dari mikroorganisme, bagi lainnya hal tersebut berarti beberapa pengalaman atau karakteristik umum yang dimiliki sebuah kelompok atau individu. Kultur yang lain mungkin dikarakteristikan dengan karakteristik religi, etnis, profesional, atau geografis.

Pada kasus penolakan laporan audit PT. Telkom oleh SEC dapat dilihat adanya perbedaan kultur yang terlihat dalam regulasi SEC sehingga mempengaruhi pemahaman suatu pihak terhadap independensi auditor. Dalam pengungkapan kasus ini lebih lanjut dapat diketahui bahwa salah satu sebab penolakan laporan audit tersebut adalah tidak adanya *consent letter* dari auditor PT. Telkomsel – anak usaha PT. Telkom – pada laporan audit PT. Telkom. Salah satu poin regulasi SEC meminta adanya *consent letter* ini, sementara dalam regulasi Bapepam tidak mengharuskan pencantuman *consent letter*. Dari perbedaan regulasi ini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan kultur antara kedua negara yang turut mempengaruhi timbulnya perbedaan regulasi terkait independensi auditor.

Perbedaan kultur di atas turut mempengaruhi pola interaksi sosial masyarakatnya. Perbedaan pola interaksi ini akan memberikan pemahaman yang berbeda pada masing-masing individu terhadap suatu objek yang sama dan akan mempengaruhi pengalaman pribadi tiap individu. Hal ini sesuai dengan landasan teoritis yang dibangun oleh Herbert Blummer dimana pada dasarnya “mensituasikan” makna dalam interaksi sosial. Landasan teoritik Blummer secara implisit memperlihatkan bahwa interaksionisme simbolik tertarik

mengkaji makna historis dan organisasi sosial dari makna yang bersifat “jadi”, berserakan, dan menjadi pembentuk utama realitas sosial (Somantri, 2005).

Sebagian besar dari penelitian-penelitian yang disebutkan sebelumnya merupakan penelitian kuantitatif yang berfokus untuk menguji hubungan yang saling mempengaruhi antara variabel penelitian dan di akhir penelitian dapat ditarik kesimpulan yang dianggap berlaku secara umum. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus menguji hubungan saling mempengaruhi antar variabel penelitian ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor, penelitian ini difokuskan untuk menggali informasi apakah ada perbedaan pemahaman independensi auditor pada pihak yang menggunakan jasa audit dengan teori independensi auditor dalam dunia pendidikan. Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas persepsi akan independensi auditor pada pihak-pihak tertentu, tidak ada penelitian yang berfokus untuk membahas perbedaan persepsi akan independensi auditor dari sudut pandang perbedaan kultur dan pengalaman pribadi individu yang merupakan hasil interaksi sosialnya.

Penelitian ini termotivasi oleh beberapa hal berikut. *Pertama*, maraknya skandal yang melibatkan akuntan publik atau auditor baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga kredibilitas akuntan publik maupun auditor dipertanyakan oleh masyarakat. Salah satu aspek kredibilitas yang dipertanyakan adalah sikap independensi auditor.

Kedua, timbulnya kasus yang cukup menarik perhatian dimana hasil laporan keuangan auditan PT. Telkom oleh KAP “Eddy Pianto dan rekan” ditolak oleh SEC selaku pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat. Menurut Alim, dkk (2007) penolakan SEC tersebut tentu memiliki alasan khusus dan bisa saja terkait dengan sikap independensi auditor. Hal ini memberikan indikasi adanya peluang perbedaan persepsi independensi auditor terkait dengan perbedaan kultur.

Ketiga, perbedaan persepsi mengenai independensi auditor dapat juga dikaitkan dengan pergeseran makna dalam masing-masing individu yang disebabkan hasil interaksi sosialnya. Oleh karena itu, makna yang semula dipahami oleh individu dapat bergeser selama proses interaksi sosialnya. Tiga penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi motivasi dilakukannya penelitian ini untuk mengkonfirmasi makna independensi auditor berdasarkan persepsi informan dalam ranah praktis secara langsung.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai kesenjangan dan motivasi penelitian, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk mengungkapkan persepsi mengenai independensi auditor yang disebabkan kultur dan pengalaman pribadi informan. Informan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga kategori yaitu praktisi, *auditee* (pengguna jasa audit) dan netral. Praktisi di sini merupakan pihak yang berprofesi dan telah mempraktekkan kegiatan audit di dalam pekerjaannya. Oleh karena itu praktisi merupakan pihak yang menerapkan independensi. Pengguna jasa audit merupakan pihak yang menyewa dan menggunakan jasa auditor untuk mendapatkan laporan hasil audit terhadap laporan keuangan yang dihasilkannya. Dengan kata lain, pengguna jasa audit merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan independensi auditor. Sementara pihak ketiga adalah pihak yang berprofesi di luar auditor dan memiliki kepentingan secara tidak langsung dengan independensi auditor. Diharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi temuan penelitian-penelitian sebelumnya dan menyediakan informasi yang menunjang pihak regulator dalam membuat kebijakan dan standar pada bidang akuntansi khususnya mengenai independensi auditor.

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa persepsi praktisi, pengguna jasa audit, dan pihak netral terkait sikap independensi auditor saat ini?
2. Bagaimana praktisi, pengguna jasa audit, dan pihak netral menyikapi independensi auditor dari sudut pandang kultur?
3. Bagaimana praktisi, pengguna jasa audit, dan pihak netral menyikapi independensi auditor berdasarkan hasil interaksi sosialnya?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas diharapkan dapat memenuhi harapan peneliti dalam memperoleh pemahaman akan persepsi dan sikap para informan saat ini terkait dengan independensi auditor yang dipandang dari sisi kultur dan hasil interaksi sosial masing-masing informan. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. *Pertama*, memahami persepsi praktisi, pengguna jasa audit dan pihak netral mengenai sikap independensi auditor. *Kedua*, melakukan penggalian dasar pembentukan persepsi praktisi, pengguna jasa audit dan pihak netral mengenai sikap independensi auditor dihubungkan dengan kultur dan hasil interaksi sehari-hari. Diharapkan dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut, dapat diperoleh wacana apakah pemahaman independensi auditor oleh para informan sesuai dengan pemahaman secara teoritis.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Independensi Auditor

Independensi auditor adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur tidak saja kepada pihak manajemen, tetapi juga terhadap pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan, seperti kreditor, pemilik maupun calon pemilik (Kasidi, 2007).

Bagaimana kompetennya seorang CPA dalam melaksanakan audit dan jasa attestasi lainnya, pendapatnya akan menjadi kurang bernilai bagi mereka yang mengandalkan laporan

auditor apabila CPA tersebut tidak independen (Boynton, et. al., 2002). Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*). Independensi sikap mental (*independence in fact*) berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan ketika mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak di dalam diri akuntan dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Independensi penampilan (*independence in appearance*) berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan atau faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya (Amani dan Sulardi, 2005; Arnan et. al., 2009). Oleh karena itu rusaknya independensi penampilan akuntan publik akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik yang bersangkutan, bahkan terhadap profesi akuntan publik secara keseluruhan dan menurunkan nilai laporan keuangan yang diaudit (Kartiningtyas, 1994).

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Arnan et. al., (2009) menjelaskan keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah: (1) sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut; (2) kecenderungan untuk memuaskan kliennya; (3) resiko kehilangan klien.

Independensi auditor merupakan topik yang menjadi perhatian untuk dilakukan penelitian. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penelitian yang berkisar seputar independensi auditor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri, Kasidi (2007) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor menurut persepsi manajer keuangan perusahaan manufaktur di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini secara simultan dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh bersama yang positif antara ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), lamanya hubungan audit, *audit fee*, pelayanan konsultasi manajemen dan keberadaan komite audit terhadap independensi auditor. Melalui

pengujian parameter secara individual dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran KAP dengan independensi auditor, tidak terdapat pengaruh antara lamanya hubungan audit dengan independensi auditor, tidak terdapat pengaruh antara *audit fee* dengan independensi auditor, tidak terdapat pengaruh antara pelayanan konsultasi manajemen dengan independensi auditor, terdapat pengaruh yang positif antara keberadaan komite audit pada perusahaan klien dengan independensi auditor.

Janie (2004) menguji persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik di Indonesia. Hasil pengujian Janie menunjukkan tidak ada perbedaan persepsi antara direktur keuangan perusahaan go publik, investor / kreditor, dan mahasiswa terhadap independensi penampilan akuntan publik.

Penelitian dari luar negeri juga telah banyak dilakukan seputar independensi auditor. Brandon, et. al (2004) melakukan pengujian terhadap satu aspek dari situasi peremehan media keuangan terhadap laporan hasil audit dengan memeriksa pengaruh pemberian jasa di luar audit oleh perusahaan auditor eksternal yang dirasakan independensi auditor dalam pasar obligasi. Hasil pengujian memberikan pengertian mengenai persepsi analis penilaian obligasi tentang independensi auditor dan memberikan bukti empiris yang berhubungan dengan peran bahwa biaya jasa audit dan di luar audit memiliki peranan dalam menentukan nilai/*rating* obligasi sebuah perusahaan.

Salehi (2009a) memeriksa salah satu faktor yang mempengaruhi independensi auditor yaitu pemberian jasa di luar audit. Pengujian yang dilakukan di Iran ini menemukan hasil bahwa para pemegang saham (*shareholders*) setuju bahwa menyelenggarakan jasa di luar audit oleh auditor eksternal pada klien yang sama berpengaruh secara negatif terhadap independensi auditor. Oleh karena itu, Salehi (2009b) meyakini bahwa baik akuntan akademik dan profesional sebaiknya mendefinisikan ulang pemberian jasa di luar audit dan membatasi pemberian jasa ini demi profesi akuntansi dan audit. Jadi profesi nasional dan

internasional hendaknya lebih aktif untuk mengklarifikasi jasa di luar audit pada auditor sama seperti dengan pihak ketiga.

Tahinakis dan Nicolau menguji efek yang dirasakan dapat memperlemah independensi auditor yang telah bersertifikat di Yunani. Efek ini dipengaruhi oleh faktor ukuran perusahaan audit, penyediaan jasa layanan konsultasi manajemen, kompetisi di antara perusahaan audit, dan masa pemberian jasa audit. Pengujian ini menemukan hasil bahwa kelompok auditor bersertifikasi dan analis keuangan sepakat bahwa perusahaan audit kecil yang beroperasi di lingkungan kompetisi tinggi, menyediakan jasa layanan konsultasi manajemen, dan masa pemberian jasa audit yang melebihi tiga tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk kehilangan independensi. Untuk kelompok eksekutif bank dalam pengambilan keputusan untuk memberi pinjaman sepakat bahwa kompetisi yang tinggi dan penyediaan jasa layanan konsultasi manajemen memiliki resiko untuk memperlemah independensi auditor bersertifikasi.

Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Disamping itu juga ditemukan hasil bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi akan independensi auditor dari pihak-pihak yang berhubungan dengan auditor. Penelitian ini berupaya untuk menggali persepsi dari informan terhadap independensi auditor. Hal tersebut bermanfaat untuk mengetahui kesesuaian hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan keadaan saat ini dimana beberapa kali telah terjadi perubahan standar terkait dengan perkembangan bidang akuntansi.

2.2 Kultur

Kultur memiliki beberapa pengertian. Menurut Poerwadarminta (1987) kultur merupakan sinonim yang diturunkan dari kata dalam Bahasa Inggris yang berarti kebudayaan. Kebudayaan memiliki pengertian sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal, budi, dan sebagainya) manusia (seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan

sebagainya) misalnya kebudayaan Tiongkok, sejarah dan kebudayaan Indonesia. (Poerwadarminta, 1987:157).

Kultur berkaitan dengan komunikasi dan keduanya ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat beberapa karakter budaya di dunia ini dan semua itu dapat dibandingkan. Samovar, et. al. (2010) menguraikan bahwa ada empat hal yang menjadi inti dari pembelajaran komunikasi antarbudaya. Klasifikasi pertama merupakan hasil pengembangan dari Hofstede yang mengidentifikasi lima nilai dimensi yang dipengaruhi dan dimodifikasi oleh budaya. Kelima nilai dimensi itu adalah individualisme/kolektivisme, menghindari ketidakpastian, kekuasaan, maskulin/feminine, dan orientasi jangka pendek/jangka panjang. Kelompok kedua berasal dari karya antropolog Kluckhohn dan Strodtbeck. Orientasi kelompok kedua ini adalah sifat manusia, orientasi manusia/alam, waktu, aktifitas, dan orientasi relasional. Taksonomi ketiga dikembangkan oleh E.T. Hall yang melihat bagaimana budaya konteks-tinggi dan konteks-rendah merespons berbagai sistem pesan. Pola budaya yang terakhir dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh ahli komunikasi antarbudaya Ting-Toomey. Penelitian tersebut menggarisbawahi peranan “wajah” dan “identitas” dalam komunikasi antarbudaya.

Terdapat beberapa penelitian di bidang akuntansi yang menghubungkan antara kultur dengan pengauditan maupun auditor. Penelitian yang dilakukan Poerhadiyanto dan Sawarjuwono (2002) terhadap beberapa auditor di satu kantor akuntan publik yang berlatar belakang budaya Jawa, menyatakan bahwa nilai-nilai budaya Jawa bukanlah ancaman terhadap independensi, atau dapat memperlemah independensi, tetapi justru memperkuatnya dengan cara yang khas. Khas apabila seorang auditor berlatar belakang budaya Jawa mampu mengerti apa itu sebenarnya Jawa, dan nilai-nilai kebenaran sejati, dan menuangkannya dalam sebuah perilaku yang independen. Sikap tersebut adalah dengan mempertimbangkan tiga hal: *tata krama*, *suba suta* dan *gelagat pasemon*. *Tata krama* berkaitan dengan olah

bahasa, dicarikan padanan bahasa untuk mencapai suatu penyimpangan yang ditemukan. *Suba sita* berkaitan dengan mencari waktu yang tepat, disertai dengan bukti-bukti yang akurat, cukup dan kompeten untuk menunjukkan kesalahan dengan segala akibatnya. *Gelagat pasemon* berkaitan dengan menata suasana batin diri auditor maupun lawan bicaranya. Seorang auditor tetap menjadi independen tanpa membuat orang lain merasa direndahkan, dengan harapan bahwa konflik tidak akan membesar.

Dari penjelasan mengenai kultur ini, dapat disimpulkan bahwa kultur dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan seseorang akan makna suatu kata sekalipun kata tersebut tertulis dan dilafalkan sama. Maka penelitian ini berupaya untuk menggali data persepsi informan terhadap independensi auditor terkait dengan pengaruh kultur yang berlaku dalam diri masing-masing informan.

2.3 Filsafat Herbert Blummer

Herbert Blummer merupakan salah satu tokoh dalam penelitian kualitatif dengan metode interaksionisme simbolik. Herbert Blummer membangun suatu landasan teoritis yang pada dasarnya “mensituasikan” makna dalam interaksi sosial. Ia berangkat dari tiga premis pokok: (1) aktor bertindak dalam ruang dan makna yang diberikan objek serta peristiwa; (2) makna biasanya muncul di luar interaksi sosial, dan aktor mengkonstruksi makna secara masing-masing; (3) makna dirubah dalam proses interaksi. Landasan teoritik Blummer implisit memperlihatkan bahwa interaksionisme simbolik tertarik mengkaji makna historis dan organisasi sosial dari makna yang bersifat “jadi”, berserakan, dan menjadi pembentuk utama realitas sosial (Somantri, 2005).

Teori *symbolic interactionism* (interaksionisme simbolik) tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead yang selanjutnya dikembangkan oleh muridnya, Herbert Blumer. Dalam teorinya ini, Blumer mengutarakan tiga prinsip utama yaitu tentang *meaning* (pemaknaan), *language* (bahasa), dan *thought* (pikiran). Ketiga prinsip ini nantinya akan

mengantarkan pada konsep “diri” seseorang dan sosialisasinya kepada “komunitas” yang lebih besar, masyarakat.

Premis pertama yang diajukan Blumer adalah *human act toward people or things on the basis of the meanings they assign to those people or things*. Hal ini memiliki maksud bahwa manusia bertindak atau bersikap terhadap manusia lainnya pada dasarnya dilandasi atas pemaknaan yang mereka kenakan pada pihak lain tersebut. Selanjutnya pemaknaan tentang apa yang nyata bagi kita pada hakikatnya berasal dari apa yang kita yakini sebagai kenyataan itu sendiri.

Premis kedua Blumer yaitu *meaning arises out of the social interaction that people have with each other* – pemaknaan muncul dari interaksi sosial yang dipertukarkan di antara mereka. Maksud dari premis ini adalah makna bukan muncul atau melekat pada sesuatu atau suatu objek secara alamiah. Jadi makna tidak bisa muncul “dari sananya”, melainkan berasal dari hasil proses negosiasi melalui penggunaan bahasa. Di sinilah Blumer menegaskan tentang pentingnya penamaan dalam proses pemaknaan.

Premis ketiga yang diutarakan Blumer adalah *an individual's interpretation of symbols is modified by his or her own thought process*. Interaksionisme simbolik menggambarkan proses berpikir sebagai proses perbincangan dengan diri sendiri yang bersifat refleksif. Menurut Mead, sebelum manusia bisa berpikir dibutuhkan bahasa untuk dapat berkomunikasi secara simbolik. Cara bagaimana manusia berpikir banyak ditentukan oleh praktek bahasa. Oleh karena itu, teori interaksionisme simbolik melihat posisi bahasa sebagai seperangkat ide yang dipertukarkan kepada pihak lain secara simbolik.

Perbedaan penggunaan bahasa pada akhirnya juga menentukan perbedaan cara berpikir manusia. Meski pemaknaan suatu bahasa banyak ditentukan oleh konteks atau konstruksi sosial, seringkali interpretasi individu sangat berperan di dalam modifikasi simbol yang kita tangkap dalam proses berpikir. Pemaknaan merujuk pada bahasa, proses berpikir merujuk

pada bahasa, dan bahasa menentukan bagaimana proses pemaknaan dan proses berpikir. Maka ketiganya berkaitan erat dan interaksi ketiganya menjadi perhatian utama dalam perspektif interaksionisme simbolik.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Jadi fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada di luar mereka (Ghozali dan Chariri dalam Chariri, 2009). Ghozali dan Chariri menjelaskan tujuan pendekatan interpretif tidak lain adalah menganalisis realita sosial manusia yang tercipta dalam rangka berinteraksi dengan yang lain dan bagaimana realita sosial ini terbentuk. Penelitian interpretif tidak menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting, melainkan mengakui bahwa demi memperoleh pemahaman mendalam, maka subjektivitas para pelaku harus digali sedalam mungkin, hal ini memungkinkan terjadinya *trade-off* antara objektivitas dan kedalaman temuan penelitian (Efferin, et. al., 2004).

Penelitian ini dilakukan dengan berpijak pada asumsi, pola pikir atau keyakinan berikut. *Pertama*, kultur yang masuk dalam diri suatu individu dapat mempengaruhi persepsi individu tersebut terhadap suatu realita sosial. Independensi auditor sekalipun telah ditetapkan oleh suatu standar namun dalam proses implementasinya dapat berbeda karena kultur yang berbeda. *Kedua*, pemahaman yang dipegang suatu individu dapat bergeser sesuai dengan proses interaksi sosialnya sehari-hari. Definisi dari independensi auditor yang dipahami seseorang dapat berbeda dengan orang yang lain karena perbedaan pengalaman dan wawasan yang dimiliki masing-masing orang.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang dijelaskan Bungin dalam Riduwan (2009) bahwa informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian. Mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, informan yang akan dipilih dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara yang tidak terstruktur, tidak terjadwal, dan dilakukan dengan sedemikian rupa. Hal ini ditujukan agar para informan dalam memberikan informasi tidak cenderung mengolah atau mempersiapkan informasi tersebut lebih dulu, serta dapat memberikan penjelasan apa adanya. Informasi yang dikumpulkan tersebut akan dicatat menjadi notulen wawancara dan selanjutnya akan dikaji sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3.3 Satuan Kajian (*Unit of Analysis*)

Penerjemahan/interpretif dari kata independensi auditor merupakan satuan kajian (unit analisis) dalam penelitian ini. Kajian (analisis) pemahaman independensi auditor tidak dibatasi pada definisi independensi auditor berdasarkan persepsi informan semata, tetapi dikembangkan untuk dipahami dari pengaruh kultur dan interaksi sosial yang dimiliki informan penelitian ini. Guna memenuhi tujuan pengembangan pemahaman tersebut maka satuan kajian dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut.

Pertama, pengungkapan pemahaman informan akan makna dari independensi auditor berdasarkan persepsi masing-masing. Pada tingkatan ini penerjemahan independensi auditor diungkapkan sesuai dengan pemahaman informan terhadap definisi standar/peraturan auditor.

Kedua, penerjemahan independensi auditor sesuai dengan persepsi informan yang dilihat dari pengaruh kultur. Pada tingkatan ini, peneliti berupaya untuk mengungkapkan “penerjemahan [peneliti] atas penerjemahan [informan]” yang dilihat dari pengaruh kultur dengan tujuan utama untuk mengungkapkan pemahaman peneliti tentang penerjemahan yang dipengaruhi kultur tersebut. *Ketiga*, penerjemahan independensi auditor sesuai dengan persepsi informan yang dipandang sebagai hasil interaksi sosialnya. Pada tingkatan ini, peneliti berupaya mengungkapkan pemahaman peneliti terhadap penerjemahan informan yang dipengaruhi wawasan dan pengalamannya sebagai hasil dari interaksi sosialnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Penerjemahan atas independensi auditor oleh para informan dianalisis sesuai dengan konteks yang melatarbelakangi timbulnya penerjemahan tersebut. Diskusi atas setiap penerjemahan independensi auditor dari para informan dilakukan dengan merefleksikannya secara kritis pada disiplin ilmu dan konsep-konsep filosofis lain yang relevan dengan konteksnya.

Analisis dan diskusi juga disampaikan secara retorik – dalam arti banyak menggunakan metafora dan analogi-analogi – dengan harapan agar dapat dengan mudah dipahami. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif filsafat Herbert Blummer untuk memperoleh hasil kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian ini.

4. INDEPENDENSI AUDITOR DALAM BERBAGAI PERSEPSI

4.1 Menyingkap Tabir Persepsi Independensi Auditor

Standar profesi AICPA dalam Winarna (2005) menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk bertindak dengan integritas dan obyektivitas. Informan kategori pertama yaitu informan yang mewakili pihak praktisi, MA (auditor eksternal) dan EAJ (auditor internal) mempersepsikan sikap independensinya sesuai dengan standar profesi AICPA tersebut. “Singkatnya, independensi auditor itu adalah sikap ketidakberpihakan

auditor kepada pihak mana pun dan obyektif dalam memandang fakta”, jelas MA. Sementara

EAJ memaparkan:

Persepsi independensi auditor saya sama seperti pada literatur atau teori yang ada. Independensi itu bermakna bebas dari tekanan berbagai pihak dan memaparkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penugasan secara apa adanya.

Bagi CRC (pemilik perusahaan) dan RC (direktur perusahaan) yang merupakan informan kategori kedua dalam penelitian ini mewakili pihak pengguna jasa audit, mereka lebih banyak memandang peran penting auditor yang independen terhadap laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Persepsi mereka ini lebih banyak dipengaruhi akan kepentingan terhadap kinerja dan peluang perkembangan ke depan dari perusahaannya.

Saya mempercayai benar akan independensi auditor dimana mereka itu adalah pihak ketiga, pihak di luar perusahaan. Karena auditor adalah pihak luar, tentunya dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan akan bertindak jujur dan objektif. Hasilnya akan lebih meyakinkan saya dalam mempercayai laporan keuangan yang dibuat perusahaan saya. [CRC – pemilik perusahaan]

Saya mengetahui peran penting auditor yang independen terhadap laporan keuangan yang kami hasilkan. Hasil pemeriksaan auditor ini akan lebih memberikan kepercayaan stakeholder terhadap laporan keuangan yang kami buat sebagai indikator kinerja perusahaan saat ini dan kelangsungannya ke depan. Kondisi tersebut didorong akan prinsip independensi yang mengharuskan auditor untuk tidak memihak dan mengungkap fakta yang ditemukannya. [RC – direktur perusahaan]

Pernyataan persepsi pemilik perusahaan dan direktur perusahaan di atas sejalan dengan kerangka yang diutarakan Christiawan (2002). Christiawan mengutarakan bahwa akuntan publik, dimana dalam hal ini adalah auditor, berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.

Dalam persepsi informan kategori akhir yang merupakan perwakilan pihak netral dimana berkepentingan secara tidak langsung dengan independensi auditor, SH (penasehat perusahaan) dan IP (konsultan pajak), pemahaman akan independensi auditor mereka masih di dalam kerangka Christiawan (2002). Kedua informan tersebut memandang bahwa auditor yang independen berarti hasil pekerjaannya telah mencerminkan sikap jujur dan objektif

dalam dirinya. “Hasil laporan audit tentunya telah dipertimbangkan secara matang oleh auditor dari segi kejujuran dan objektivitasnya sehingga auditor berani mengeluarkan pernyataannya terhadap laporan keuangan yang diperiksanya”, urai SH. Selaras dengan SH, IP pun menuturkan bahwa opini yang dikeluarkan oleh auditor tentunya telah dipertimbangkan menurut sikap independennya yang tidak memihak pada pihak mana pun. “Saya mempercayai hasil laporan auditor dimana hasilnya itu yang nantinya akan saya gunakan sebagai pertimbangan kewajaran pembayaran pajak perusahaan”, urai IP.

Pernyataan-pernyataan para informan di atas menggambarkan persepsi masing-masing terhadap independensi auditor. Dapat diketahui bahwa masing-masing informan mempersepsikan sikap independensi auditor saat ini sesuai dengan teori, literatur atau peraturan yang telah dibuat. Bagi auditor, baik internal maupun eksternal, mereka mempersepsikan independensinya sesuai dengan standar profesi AICPA yaitu ketidakberpihakan terhadap pihak manapun dan objektif dalam mengungkapkan fakta. Sementara bagi pihak pengguna jasa audit dan netral, kedua kategori informan ini memiliki sudut pandang yang sama dimana mereka mempersepsikan independensi auditor dari bobot kepercayaan mereka terhadap auditor yang bersikap tidak memihak dan objektif. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok antara persepsi masing-masing informan akan sikap independensi auditor sekalipun mereka memandangnya dari kepentingan yang berbeda.

4.2 Independensi dalam Kacamata Kultur

Terdapatnya kultur yang bermacam-macam dapat mempengaruhi tingkat independensi seorang auditor. Interaksi antara masyarakat yang berbeda budaya merupakan fenomena yang dapat terjadi sehari-hari. Menurut Rakhmat dan Mulyana (2003) karakteristik budaya yang berbeda tersebut dapat menimbulkan konflik saat antar budaya ini saling berinteraksi. Anugrah dalam Salsabila (2011) menjelaskan bahwa pemaknaan pesan akan semakin sulit

pada daerah komunikasi antar budaya. Seringkali pihak klien, baik pemilik perusahaan maupun direktur perusahaan, menghendaki agar auditor yang melakukan pengauditan terhadap perusahaan mereka memiliki latar belakang budaya yang sama atau minimal memahami budaya mereka.

Jujur saja, saya cenderung lebih menyukai jika auditor yang memeriksa perusahaan saya berlatar belakang sama dengan saya, atau minimal memahami budaya saya. Kondisi ini akan memudahkan saya dalam berkomunikasi dan menerangkan segala hal kepada auditor tersebut. [CRC – pemilik perusahaan]

RC (direktur perusahaan) pun setali tiga uang dengan pendapat CRC tersebut. Ketika itu kendalanya adalah bahasa kedua pihak yang berbeda sehingga RC membutuhkan bantuan penerjemah. “Kondisi tersebut sungguh tidak nyaman. Saya tidak bisa bebas berkomunikasi dengan auditor dan membutuhkan bantuan pihak ketiga hanya untuk sekedar berkomunikasi”, jelas RC. Selanjutnya RC memaparkan bahwa dalam kondisi tersebut, dirinya merasa terbatas untuk memberikan informasi perusahaan yang berhak akses terbatas.

MA (auditor eksternal) pun memiliki pengalaman kultur yang serupa dengan pengalaman RC ketika dirinya melakukan tugas audit di luar pulau Jawa dimana kliennya tidak fasih berbahasa Indonesia. Keadaan ini mengharuskannya untuk mempergunakan bantuan penerjemah dalam berkomunikasi dengan kliennya. Disamping kendala bahasa, MA pun menemui kendala kultur organisasi klien tersebut yang mempergunakan metode pencatatannya semi komputer sehingga tidak tertata dengan baik.

Sudah susah berkomunikasinya, pencatatannya juga tidak tertata yang baik. Ada yang dicatat di komputer, tapi juga ada yang masih manual di buku. Kondisi ini membuat proses audit menjadi lebih susah yang tentunya juga berpengaruh pada penyimpulan saya pada akhirnya. [MA – auditor eksternal]

Berbeda dengan pengalaman EAJ (auditor internal) yang berkaitan dengan kultur. Ketika bertugas audit unit perusahaan, dirinya menemukan tantangan dari perbedaan kultur dimana karyawan unit perusahaan beranggapan bahwa proses audit akan mencari-cari kesalahan yang mereka lakukan.

Saat itu saya harus berusaha keras meyakinkan bahwa saya di sana bukan untuk mencari-cari kesalahan mereka. Membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama sampai mereka yakin dan terbuka dengan kehadiran auditor di sana. [EAJ – auditor internal]

Persepsi dari CRC, RC, MA dan EAJ mengenai pengalamannya dalam berinteraksi beda budaya di atas menggambarkan kondisi yang berbeda. Persepsi CRC, RC dan MA selaras dengan pendapat Rakhmat dan Mulyana (2003) yang mengungkapkan bahwa karakteristik budaya yang berbeda dapat menimbulkan konflik ketika antar budaya ini berinteraksi. Sementara EAJ mempersepsikan berbeda dimana dalam pengalamannya, dirinya tidak mengalami konflik yang berarti, sekalipun dirinya berinteraksi dengan pihak yang berlatar belakang budaya berbeda.

Auditor yang memiliki latar belakang budaya sama atau memahami budaya klien, tidak akan kesulitan dalam berkomunikasi atau memahami klien baik dari segi bahasa maupun pola pikir. Ketika penghalang perbedaan budaya telah diatasi dengan kesejajaran, maka auditor akan dapat dengan leluasa bertindak dalam proses pengauditan secara independen.

Namun, kesamaan budaya tersebut juga harus diperhatikan karena dapat menimbulkan kedekatan emosional. Kedekatan emosional inilah yang dikhawatirkan akan mendorong auditor untuk memberikan batas toleransi yang berlebihan terhadap klien yang diperiksanya dan akan mengurangi bobot independensi auditor.

Salah satu dimensi nilai budaya Hofstede adalah kolektivisme atau individualisme. Menurut Mulyana (2010) bangsa Indonesia, terutama Jawa dan Sunda adalah penganut kolektivisme, suatu pandangan bahwa kelompok lebih penting daripada individu. Penganut individualisme berpaham sebaliknya.

Berkaitan dengan interaksi antar budaya ini, SH (penasehat perusahaan) mengatakan bahwa independensi auditor memang harus dan bisa ditegakkan dalam penugasan secara profesional. “Namun akan banyak faktor yang mempengaruhi penerapannya. Salah satunya adalah faktor budaya”, jelas SH. Lebih lanjut SH memberikan contoh jika auditor dalam

penugasannya ternyata klien yang diauditnya adalah orang yang sangat dia hormati, maka keadaan ini akan mempengaruhi sikap independennya sekalipun auditor tersebut tidak memiliki kepentingan usaha maupun keuangan dengan kliennya. EAJ pun turut menyetujui penjelasan SH ini. EAJ memaparkan:

Ketika dalam penugasan saya menemukan bahwa klien yang akan saya audit adalah orang yang saya hormati, suatu misal dosen yang saya segani waktu kuliah dulu, jujur saja hal ini akan memungkinkan mempengaruhi proses pertimbangan pemberian opini saya. Meskipun begitu saya akan tetap menjalankan tugas dengan profesional.

Persepsi SH di atas mencerminkan kesesuaiannya dengan penjelasan Mulyana (2010) akan masyarakat kolektivisme dimana menjunjung tinggi nilai-nilai kolektivitas. Begitu pun dengan EAJ yang memaparkan persepsinya sesuai dengan penjelasan ciri masyarakat kolektivitas dari Mulyana.

IP (konsultan pajak) menyebutkan bahwa dalam proses interaksi antar budaya akan menemui hasil yang berbeda-beda dalam setiap waktu.

Bisa saja suatu saat ketika berinteraksi dengan pihak yang berbeda budaya menemui konflik. Namun pada kesempatan lain, interaksi yang dilakukan dengan pihak lain yang berlatar belakang budaya sama seperti contoh pertama tidak menemui konflik. [IP – konsultan pajak]

Oleh karena itu, IP tidak terlalu mengambil pusing dengan komunikasi antar budaya yang dilakukan auditor dengan kliennya, tetapi dirinya cukup melihat hasil laporan auditor tersebut dan mempercayai bahwa auditor tersebut telah independen dalam penugasannya. Sikap tersebut diambil IP karena dirinya pun kerap menemui bahwa komunikasinya dengan pihak yang berbeda budaya, hasilnya berbeda setiap waktunya.

Penjelasan IP di atas menggambarkan pentingnya unsur waktu dalam komunikasi. Antropolog Edward T. Hall dalam Mulyana (2010) menguraikan bahwa setiap budaya memiliki kerangka waktunya sendiri yang ditandai dengan pola yang unik. Oleh karena itu Mulyana menguraikan arti pentingnya waktu bagi komunikasi adalah bahwa waktu dengan konteks tertentu kerap memberikan makna tertentu kepada pesan komunikasi dan sebagai konsekuensinya juga membawa pengaruh tertentu bagi manusia.

4.3 Interaksionisme Simbolik yang Menyelimuti Independensi

Perspektif interaksionisme simbolik menjadikan kaitan erat dan interaksi antara proses berpikir, proses pemaknaan, dan bahasa sebagai perhatian utamanya. Dari dasar pemahaman tersebut dapat dilihat bahwa bahasa memegang peranan penting karena bahasa menjadi seperangkat ide yang dipertukarkan kepada pihak lain secara simbolik.

Proses interaksi sosial yang terjalin antara auditor dengan klien turut mempengaruhi tingkat independensi. Interaksi sosial ini akan menciptakan suasana kedekatan emosional antara kedua pihak tersebut. Hal ini ditunjukkan dari pernyataan MA (auditor eksternal) dan EAJ (auditor internal) berikut:

Ketika klien memperlakukan kami dengan hangat, maka kami akan merasa diterima tidak hanya sebagai orang yang dibutuhkan jasanya, tetapi lebih dari itu. Saat seperti itu kami akan merasa dihormati dan *sungkan* jika terlalu ketat dalam memeriksa laporan keuangan klien. [MA – auditor eksternal]

Jika atasan saya menugaskan saya dengan wajar dan pantas, maka saya akan segan terhadapnya. Selanjutnya ketika melakukan pemeriksaan saya akan memberikan batas toleransi yang cukup (besar) terhadap perusahaan. [EAJ – auditor internal]

Batas toleransi yang diberikan oleh auditor akan berbeda sesuai dengan perlakuan klien terhadap mereka. Batas toleransi yang dimaksud adalah toleransi terhadap suatu kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan klien. Pemberian batas toleransi dengan kedekatan emosional antara auditor dengan klien ini sesuai dengan ketiga premis filsafat Herbert Blummer, dimana proses perlakuan di antara mereka sesuai dengan premis pertama yaitu sikap manusia dengan manusia lainnya didasari atas pemaknaan terhadap pihak lain tersebut. Selanjutnya ketika hubungan yang dijalin menjadi hangat atau lebih dekat melalui komunikasi yang baik, maka akan muncul pemaknaan dari hubungan ini. Hal ini sesuai dengan premis kedua Herbert Blummer dimana pemaknaan muncul dari interaksi sosial yang terjadi. Pada akhirnya, proses ini akan mempengaruhi sikap dari auditor terhadap kliennya khususnya dalam pemberian batas toleransi. Keadaan ini sesuai dengan premis ketiga

Blummer yaitu pemaknaan seseorang dapat berubah sesuai dengan proses pemikiran dalam dirinya sendiri.

CRC (pemilik perusahaan) pun selalu mengharapkan agar auditor mampu menjalin hubungan yang hangat dengan jajaran manajemen perusahaannya.

Hal tersebut dibutuhkan agar mereka mau mendukung sepenuhnya proses audit sehingga auditor dapat menemukan seluruh fakta. Tentunya, auditor juga saya harap dapat menegakkan sikap independensinya di samping hubungan hangat ini.

Harapan CRC akan jalinan hubungan yang hangat antara auditor dengan manajemen perusahaannya di atas sesuai dengan premis pertama dan ketiga dari filsafat Herbert Blummer. Di sisi lain, harapan CRC tentang dukungan penuh manajemen dalam proses audit sebagai hasil dari jalinan hubungan yang hangat, selaras dengan premis kedua Blummer.

RC (direktur perusahaan) mengungkapkan bahwa dirinya selalu merasa tidak nyaman ketika akan menghadapi proses audit, khususnya ketika terjadi rotasi auditor. Lebih lanjut RC mengungkapkan bahwa penyebab utama rasa ketidaknyamanannya adalah kemampuan komunikasi auditor dalam berinteraksi selama proses audit nantinya. RC menguraikan:

Jika auditor nantinya kurang cakap berkomunikasi dan menjaga kenyamanan staf saya selama proses audit, besar kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami strategi dan operasional perusahaan. Hal ini tentunya akan turut berpengaruh pada proses penemuan fakta-fakta oleh auditor yang nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan pengeluaran opini auditor.

Uraian RC selaras dengan ketiga premis Herbert Blummer dalam teori interaksionisme simbolik. Ketidaknyamanan RC di awal rotasi auditor menggambarkan premis pertama yang menyebutkan bahwa sikap seseorang didasarkan atas pemaknaan yang diberikannya terhadap pihak lain. Terkait kemampuan komunikasi yang dikhawatirkan RC, keadaan tersebut mencerminkan premis kedua yaitu pemaknaan timbul dari hasil pertukaran interaksi sosial yang terjadi. Pola pikir yang dimiliki RC akan kemampuan komunikasi auditor ini selaras dengan premis ketiga dimana pemaknaan seseorang muncul sebagai hasil pemikiran dalam dirinya sendiri.

Dalam penerapan independensinya selama proses penugasan, auditor pun harus menerapkan secara wajar. Penerapan wajar di sini memiliki maksud bahwa proses audit yang dilakukan harus sesuai dengan perjanjian kontrak awal penugasan, tidak diperkenankan untuk memeriksa di luar cakupan kontrak tersebut.

Selama ini saya dalam melaksanakan tugas audit hanya dalam *scope* kontrak yang telah disepakati di awal. Tidak pernah sekalipun saya mengaudit di luar *scope* kontrak. [MA – auditor eksternal]

Ketika melakukan pemeriksaan, saya hanya akan memeriksa sesuai *agreement* yang dibuat dengan pimpinan saya. Jika saya secara tidak sengaja menemukan fakta yang di luar *agreement* penugasan, maka fakta itu hanya akan menjadi catatan untuk penugasan di kemudian hari apabila diberikan penugasan yang mencakup area tersebut. [EAJ – auditor internal]

Jika auditor dalam laporannya mencantumkan penemuan fakta di luar kesepakatan kontrak, maka hal itu hanya akan menjadi catatan bagi saya sebagai pertimbangan untuk proses audit selanjutnya. Namun fakta tersebut tidak akan menjadi fokus saya. [CRC – pemilik perusahaan]

Auditor sah-sah saja jika secara kebetulan menemukan fakta di luar kontraknya. Namun penemuan dan rekomendasi atas fakta tersebut akan saya abaikan. [RC – direktur perusahaan]

Pendapat MA, EAJ, CRC dan RC di atas mencerminkan premis pertama dan ketiga dalam filsafat Herbert Blummer. Pencerminkan tersebut didasarkan bahwa pemahaman masing-masing informan pada awal kontrak merupakan sikap yang mereka tunjukkan dengan dasar pemaknaan mereka terhadap pihak lain. Sementara pemaknaan yang diberikan masing-masing informan terhadap hasil proses audit merupakan hasil proses berpikiran dalam diri masing-masing informan.

Ketika auditor ditugaskan dalam suatu pemeriksaan laporan keuangan bersuasana politik, independensi yang dimiliki akan tergerus semakin besar. Hal ini disebabkan dalam politik tekanan yang diterima auditor sangat besar. Tekanan tersebut timbul karena masyarakat cenderung pesimis akan independensi auditor saat mengaudit laporan keuangan suatu partai politik, sementara klien akan meminta batas toleransi yang sangat besar.

Saat saya melakukan pengauditan bersuasana politik, saya merasakan tekanan yang besar sekali terhadap independensi saya, tidak seperti dalam pengauditan normal. Sekalipun

saya telah menerapkan independensi dengan ketat, masyarakat cenderung menganggap independensi saya berkurang bahkan hilang. [MA – auditor eksternal]

Kondisi yang dirasakan MA dalam proses audit bersuasana politik di atas sesuai dengan premis-premis dalam filsafat Herbert Blummer. Sikap dari MA, masyarakat dan klien menunjukkan premis pertama. Di sisi lain, sikap pesimis yang timbul dalam masyarakat merupakan hasil interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka hal ini sesuai dengan premis kedua Blummer. Sementara itu, tekanan yang dirasakan MA saat pengauditan bersuasana politik sesuai dengan premis ketiga.

Menurut sudut pandang konsultan pajak, hasil laporan auditor secara tidak langsung akan selalu dianggap independen. Namun anggapan tersebut dengan suatu catatan.

Selama pembayaran pajak perusahaan tersebut wajar, saya akan menerima hasil laporan auditor, entah auditor tersebut menerapkan independensi atau tidak. Jika setelah saya periksa hasil laporan auditor tersebut menghasilkan perhitungan pajak yang tidak wajar, maka saya akan mengabaikannya dan memperhitungkan pajak perusahaan dengan norma yang berlaku. [IP – konsultan pajak]

Kenyataan dari konsultan pajak tersebut rupanya selaras dengan penasehat perusahaan. Penasehat perusahaan akan cenderung menganggap hasil simpulan auditor independen, dengan sedikit catatan.

Selama hasil laporan keuangan perusahaan dapat memperpanjang kelangsungan usahanya, saya akan menerima hasil simpulan auditor terhadap laporan keuangan perusahaan. [SH – penasehat perusahaan]

Pendapat dari IP dan SH di atas sesuai dengan premis pertama dan ketiga dari teori Herbert Blummer. Sikap yang ditunjukkan IP dan SH dalam menerima simpulan auditor mencerminkan premis pertama, sementara tindakan lanjutan dari penerimaan SH dan IP terhadap simpulan auditor menunjukkan premis ketiga.

4.4 Kompleksitas Independensi Auditor

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) pun mengatur secara khusus mengenai independensi melalui Standar Auditing (SA) Seksi 220. Standar tersebut mengharuskan auditor bersikap independen karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim.

Ketiga kategori informan pada penelitian ini dalam mengungkapkan persepsi awalnya tidak terdapat perbedaan yang mencolok di antara masing-masing informan tersebut. Begitu pun ketika dikaitkan dengan peraturan atau prinsip auditor, persepsi masing-masing informan senada dengan penjelasan di dalam peraturan, teori maupun prinsip auditor.

Situasi yang kompleks ditemukan ketika memandang independensi auditor dengan kaca mata kultur. Terdapat perbedaan di antara pendapat masing-masing informan terkait dengan komunikasi berlatar belakang budaya yang berbeda. Sebagian informan merasakan kondisi yang lebih nyaman jika selama proses audit berkomunikasi dengan latar belakang budaya yang sama. Bagi mereka hal ini turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan opini yang akan dikeluarkan. Namun, sebagian informan lainnya merasakan bahwa tidak ada kendala ketika berkomunikasi dengan latar belakang budaya yang berbeda

Keadaan makin kompleks ketika interaksionisme simbolik menyelimuti independensi auditor. Hasil interaksi sosial masing-masing informan yang beragam turut memberikan hasil penelitian yang beragam. Proses interaksi sosial tersebut mempengaruhi proses berpikir dan proses pemaknaan masing-masing informan. Hal ini akan mempengaruhi pemahaman akan independensi serta proses pengambilan keputusan baik dalam memberikan pernyataan opini auditor maupun dalam proses mempercayai hasil laporan auditor tersebut.

5. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1 Simpulan Penelitian

Independensi termasuk salah satu ciri dan merupakan tulang punggung auditor profesional. Selain menerapkan independensi secara mental, auditor pun dinilai oleh masyarakat akan sikap independensinya dalam melaksanakan tugas pengauditan. Oleh karena

itu peraturan dan prinsip etika auditor menuntut bahwa auditor harus selalu menegakkan independensi. Namun, munculnya bermacam-macam kasus mengenai perusahaan yang melakukan kecurangan sekalipun telah diperiksa auditor menimbulkan degradasi tingkat keyakinan masyarakat akan independensi auditor.

Apa persepsi para praktisi, pengguna jasa audit dan pihak netral terkait sikap independensi auditor saat ini? Bagaimana para informan menyikapi independensi auditor dari sudut pandang kultur dan berdasarkan hasil interaksi sosialnya? Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut bermacam-macam sesuai dengan persepsi masing-masing informan penelitian. Persepsi dasar para informan (auditor eksternal, auditor internal, pemilik perusahaan, direktur perusahaan, penasehat perusahaan, dan konsultan pajak) mengenai sikap independensi auditor saat ini sesuai dengan peraturan yang dibuat.

Apabila independensi auditor dihubungkan dengan sudut pandang kultur, seluruh informan menjelaskan bahwa mereka cenderung lebih memilih bekerja sama dengan pihak yang berlatar belakang budaya sama atau setidaknya saling memahami perbedaan pola budaya masing-masing. Hal ini dikehendaki agar komunikasi antara masing-masing pihak dapat terjalin dengan baik dan menghindari kemungkinan seringnya terjadi kesalahpahaman.

Sementara dari sudut pandang hasil interaksi sosial, para auditor baik eksternal maupun internal akan memberikan batas toleransi yang besar terhadap klien dalam proses pengaditan ketika mereka diperlakukan dengan baik, wajar dan hangat oleh klien. Hal tersebut sesuai dengan harapan klien yang selalu mengharapkan memperoleh toleransi sebesar-besarnya dari auditor terhadap kesalahan atau penyimpangan yang mereka lakukan. Sedangkan bagi pihak netral (penasehat perusahaan dan konsultan pajak) yang berkepentingan tidak langsung dengan independensi auditor, selama laporan hasil audit tersebut menunjukkan dukungan jalannya usaha dan pembayaran pajak yang wajar dari perusahaan, mereka tidak mempermasalahkan apakah auditor tersebut independen atau tidak.

Pemaparan di atas telah menjelaskan hasil jawaban para informan mengenai independensi auditor dari sudut pandang kultur dan hasil interaksi sosialnya. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan antara teori independensi auditor yang selama ini diberikan dalam dunia pendidikan dengan kondisi riil di lapangan praktek.

5.2 Implikasi Penelitian

Berbagai jawaban mengenai independensi auditor yang dipandang dari pengaruh kultur dan interaksi sosial dalam penelitian ini memberikan implikasi berikut. Berbasis pada peraturan dan etika auditor, independensi harus ditegakkan dalam proses penugasan auditor baik secara mental maupun penampilan. Jika independensi tidak diterapkan saat bertugas mengaudit, maka tingkat kredibilitas auditor tersebut akan dipertanyakan dan secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat kredibilitas profesi auditor.

Beberapa penelitian akademik telah banyak dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Sehubungan dengan hasil penelitian faktor-faktor tersebut telah banyak dilakukan tindakan untuk memberikan respon terhadap hasil-hasil tersebut. Namun, independensi auditor dengan pengaruh kultur dan hasil interaksi sosial masih mendapatkan sedikit perhatian. Pandangan umum yang berlaku mengenai independensi auditor adalah auditor harus menegakkan independensinya, tidak boleh berkurang sedikit pun. Sementara ketika dikaitkan dengan pengaruh kultur dan hasil interaksi sosial, auditor menemui beberapa kondisi yang menuntut untuk memberikan toleransi dalam tugas pengauditannya.

Dalam konteks ini, diperlukan penyesuaian pihak regulator untuk menyikapi kondisi yang menuntut toleransi auditor ini dalam pembuatan standar profesi auditor. Dalam penyesuaian tersebut, diperlukan pemikiran badan regulator akan batas-batas toleransi yang boleh diberikan auditor terhadap kliennya. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi pemberian batas toleransi yang berlebihan oleh auditor.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan maupun hasil penelitian ini mengandung beberapa keterbatasan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan ini hanya berusaha untuk memahami sikap para informan terhadap praktek independensi auditor sesuai dengan profesinya masing-masing tanpa menggali lebih dalam langkah-langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya terhadap hasil yang diperoleh.

Kedua, pendapat dan sikap yang diperoleh dari para informan terhadap praktek independensi dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasi sebagai profesi masing-masing informan secara keseluruhan. Penelitian lanjutan dengan informan yang berbeda masih sangat perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlawat, S.S. dan D.J. Lowe. 2004. *An Examination of Internal Auditor Objectivity: In-House versus Outsourcing*. Auditing: A Journal of Practice & Theory. Vol. 23 No. 2. September. Pp. 147-158.
- Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *SNA X Makassar*. AUEP08.
- Amani, Nani dan Sulardi. 2005. Persepsi Akuntan Pendidik dan Praktisi Terhadap Independensi Penampilan Akuntan Publik dan Advertensi Jasa Kantor Akuntan Publik (Survei di Surakarta dan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Bisnis*. Vol. 5. No. 2. pp. 137-148.
- Amilin, W. Utami, dan S. Wulandari. 2008. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor Eksternal Menurut Persepsi Bankir. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Vol. 8. No. 1, April. Pp. 29-44.
- Arnan, S.G., N. Wisna, dan I. Firmansyah. 2009. *Auditing*. Politeknik Telkom. Bandung.
- Arthur, D. 1978. *Independence, Yes, But Where Do We Draw The Line*. Accountancy. December.
- Bagranoff, N.A., K.A. Houghton, dan J. Hronsky. 1994. *The Structure of Meaning in Accounting: A Cross-Cultural Experiment*. Behavioral Research in Accounting. Vol. 6, Supplement 1994. Pp. 35-57.
- Bakar, N.B.A., A.R.A. Rahman, dan H.M.A. Rashid. 2005. *Factors Influencing Auditor Independence: Malaysian Loan Officer's Perceptions*. Managerial Auditing Journal. Vol. 20 No. 8. Pp. 804-822.

- Basuki, D. 2011. Transformasi di Bawah “Todongan Senjata”. *Blog TEMPO Interaktif. Ekonomi Bisnis*. <http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/transformasi-di-bawah-todongan-senjata/> (diakses 23-01-2012)
- Brandon, D.M., A.D. Crabtree, dan J.J. Maher. 2004. *Nonaudit Fees, Auditor Independence, and Bond Ratings*. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. Vol. 23 No. 2. September. Pp. 89-103.
- Brown, H.J. 1971. *Professional Ethics* dalam James AA Cashin, *Handbook for Auditor*. New York: McGraw Hill Book Company.
- Boynton, W.C., R.N. Johnson, W.G. Kell. 2002. *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Chariri, A. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. *Paper Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 31 Juli - 1 Agustus.
- Christiawan, Y.J. 2002. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 4. No. 2. Fakultas Ekonomi-Universitas Kristen Petra.
- Dahlan, A. 2007. Kajian tentang Nilai Kultur Individualis-Kolektivis dan Gaya Resolusi Konflik Auditor. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 8 No. 1. Februari. Pp. 134-148.
- Efferin, et. al. 2004. *Metode Penelitian untuk Akuntansi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Francis, J.R. 2006. Are Auditors Compromised by Nonaudit Services? Assessing the Evidence. *Contemporary Accounting Research*. Vol. 23 No. 3. Pp. 747-760.
- Gul, F.A. 1989. Bankers’ Perceptions of Factors Affecting Auditor Independence. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 2 No. 3. Pp. 40-51.
- Gubrium, J.F. dan J.A. Holstein. 1992. *Qualitative Methods* dalam *Encyclopedia of Sociology*. Vol. 3. New York: Macmillan Publishing Company.
- Janie, D.N.A. 2004. *Persepsi Masyarakat Terhadap Independensi Akuntan Publik di Indonesia*. Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
<http://eprints.undip.ac.id/10577/1/2004MAK5993.pdf> (diakses 29-10-2011)
- Kartiningtyas, E. 1994. *Pandangan Masyarakat Pengguna Laporan Keuangan atas Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Penampilan Akuntan Publik (Penelitian Empiris di Surabaya)*. Skripsi Universitas Airlangga. Surabaya.
- Kasidi. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor Persepsi Manajer Keuangan Perusahaan Manufaktur di Jawa Tengah*. Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
<http://eprints.undip.ac.id/18045/1/Kasidi.pdf> (diakses 18-10-2011)

- Kell, W.G. 1989. *Modern Auditing*. John Wiley & Sons, Forth Edition. Singapore.
- Kustono, A.S. 2003. Peran *Locus of Control* Terhadap Persepsi Independensi Auditor. *Ekuitas*. Vol. 7 No. 3 September. 261-276
- Ludigdo, U. dan M. Machfoedz. 1999. Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Terhadap Etika Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 2 Jan. 1-9
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kesebelas. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moore, D.A., P.E. Tetlock, L. Tanlu, dan M.H. Bazerman. 2006. *Conflicts of Interest and the Case of Auditor Independence: Moral Seduction and Strategic Issue Cycling*. *Academy of Management Review*. Vol. 31 No. 1. Pp. 10-29.
- Mulyana, D. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya: Pemikiran, Perjalanan, dan Khayalan*. Cetakan pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahaningsih, P. 2005. Analisis Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi (Studi Terhadap Peran Faktor-faktor Individual: *Locus of Control*, Lama Pengalaman Kerja, *Gender* dan *Equity Sensitivity*). *SNA VIII Solo*. KAMP-03.
- Pany, K., dan O.R. Whittington. 1997. *Auditing*. Second Edition. USA: Irwin.
- Poerhadiyanto, D., dan T. Sawarjuwono. 2002. Menegakkan Independensi dari Pengaruh Budaya Jawa: Tata Krama, Suba Sita, Gelagat Pasemon. *SNA V Semarang*.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan X. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purba, D.H. 2009. *Analisis Pengaruh Independensi Auditor, Etika Auditor, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Surakarta. <http://etd.eprints.ums.ac.id/6167/1/B200050148.PDF> (diakses 22-8-2011)
- Purnamasari, St. Vena. 2006. Sifat Machiavellian dan Pertimbangan Etis: Anteseden Independensi dan Perilaku Etis Auditor. *SNA IX Padang*. K-AUDI 10.
- Rakhmat, J. dan D. Mulyana. 2003. *Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Retnowati, N. 2003. *Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia Studi Kasus di Jateng*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Riduwan, A. 2009. Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba: Studi Hermeneutika. *SNA XII*.

- Ritonga, U. dan Padjar. 2004. KPPU Denda Hadi Sutanto-PwC Rp 20 Miliar. *Koran TEMPO 25 Juni*. Ekonomi dan Bisnis. Jakarta.
<http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=BQIQUINXUwUE> (diakses pada tanggal 23-01-2012)
- Salehi, M. 2009(a). *Non-Audit Service and Audit Independence: Evidences from Iran*. *International Journal of Business and Management*. Vol. 4 No. 2. Februari. 142-152.
- Salehi, M. 2009(b). *In the Name of Independence: with Regard to Practicing Non-Audit Service by External Auditors*. *International Business Research*. Vol. 2 No. 2. April. 137-147.
- Salsabila, H. 2011. *Akomodasi Komunikasi dalam Interaksi Antarbudaya (Kasus Perantau yang Berasal dari Daerah Banyumasan dalam Mengkomunikasikan Identitas Kultural)*. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Semarang.
- Samovar, L.A., R.E. Porter, dan E.R. McDaniel. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya (Communication Between Cultures)*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Humanika.
- Santoso, K. 2002. Dampak Kebangkrutan Enron Terhadap Citra Profesi Akuntan Publik. *Media Akuntansi*. Edisi 25 (IX). Pp. 17.
- Schein, E.H. 2010. *Organizational Culture and Leadership*. Fourth Edition. San Francisco: Jossey-Bass.
- Singgih, E.M., dan I.R. Bawono. 2010. Pengaruh Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di KAP "Big Four" di Indonesia). *SNA XIII Purwokerto*. AUD_11.
- Somantri, G.R. 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*. Vol. 9 No. 2. Desember. 57-65.
- Suryaningtias, A. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik (Studi Survei Pada Kantor Akuntan Publik di Bandung)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.
<http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/569/0103422.pdf?sequence=1>
 (diakses 29-10-2011)
- Tahinakis, P., dan A. Nicolau. _____. *An Empirical Analysis On The Independence Of The Greek Certified Auditor-Accountant*. *Accounting Business and The Public Interest*. Vol. 3 No. 1.
- Trisnaningsih, S. 2007. Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman *Good Governance*, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. *SNA X Makassar*. AMKP02_2.
- Winarna, J. 2005. Independensi Auditor: Suatu Tantangan di Masa Depan. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*. Vol. 5, No. 2. Agustus. Pp. 178-186.

Wirawan. 2007. *Budaya dan Iklim Organisasi: Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

Yura. 2003. Tidak Ada Penolakan Laporan Keuangan Telkom. *Koran TEMPO 31 Mei*. Ekonomi dan Bisnis. Jakarta.

<http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=AgRRVVQADAUH> (diakses pada tanggal 23-01-2012)

<http://yearrypanji.wordpress.com/2008/03/17/teori-interaksionisme-simbolik/> (diakses pada tanggal 12-4-2012)

APPENDIX

Tabel 1
Informan Penelitian

Identitas Informan	Bidang Pekerjaan/Posisi/Jabatan dalam Organisasi
<i>Praktisi:</i>	
1. MA	Auditor eksternal, auditor senior pada salah satu KAP di Surabaya.
2. EAJ	Auditor internal pada salah satu perusahaan swasta di Surabaya.
<i>Pengguna jasa audit:</i>	
3. CRC	Pemilik perusahaan MG yang bertempat di Jakarta.
4. RC	Direktur perusahaan MS yang bertempat di Jakarta.
<i>Pihak Netral:</i>	
5. SH	Penasehat beberapa perusahaan di Jakarta dan Surabaya.
6. IP	Konsultan pajak dari kantor konsultan HC yang bertempat di Surabaya.

Catatan: Akronim identitas dan organisasi tidak merefleksikan nama yang sebenarnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI:

1. Nama : Indriya Kalana
2. Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 3 Mei 1986
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan/Jabatan : Programmer Analis/Staf
5. Alamat Rumah/Telepon : Jl. Gembong Sawah III / 29
Surabaya 60141
6. Email : indriyakalana@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. Tamat SD di SDN Kertajaya XII Surabaya tahun 1998
2. Tamat SLTP di SLTPN 1 Surabaya tahun 2001
3. Tamat SLTA di SMAN 5 Surabaya (Akselerasi) tahun 2003
4. Pendidikan Tinggi (PT):

Nama PT.	Tempat	Tahun	Keterangan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya	Surabaya	2010-2012	Lulus S2
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya (STIKOM)	Surabaya	2003-2008	Lulus S1

C. RIWAYAT PEKERJAAN:

Tahun	Bekerja di	Jabatan
2011 - sekarang	PT. Wonokoyo Jaya Corporindo	Programmer Analis
2010 - 2011	HLP Consultant	Kepala Kantor
2010	PT. Ebiz Infotama Interindo	IT Trainer
2005 - 2010	STIKOM	Staf Humas & Dosen

CURRICULUM VITAE

A. PERSONAL DATA

Nama : Prof. Sutjipto Ngumar, Ak. CPA
Tempat / Tanggal Lahir : Purworejo / 23 September 1944
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat & No. Telepon : Perum YKP Pandugo Blok PN / 4 Surabaya
(031) 8709005, 8709006

B. PENGALAMAN KERJA

Tahun	Nama Perusahaan	Jabatan
1972 – sekarang	Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya	Dosen / PNS Kopertis wilayah VII
1985 – sekarang	KAP. Bambang, Sutjipto Ngumar dan rekan	Partner

C. KEORGANISASIAN / LAIN - LAIN

Tahun	Nama Organisasi	Jabatan
1971 – sekarang	ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia)	Anggota
1980 – sekarang	IAI (ikatan Akuntan Indonesia)	Anggota

Nama : Drs. Ikhsan budi R., M.Si., Ak.

Tempat, Tgl Lahir: Kudus, 4 Nopember 1969

Jabatan Akademik: Lektor Kepala

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya

Penelitian yang pernah dilakukan dan pernah dipublikasikan (5 tahun terakhir)

Tahun	Judul Penelitian	Nama Jurnal
2011	Memahami Paradigma Penelitian Non Positivisme dan Implikasinya dalam Penelitian Akuntansi	JAMBSP
2011	Bayang-bayang Kapitalisme dalam Genealogi Akuntansi Modern	JAMBSP
2010	Perilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif dalam Penyusunan APBD (Bukti Empiris atas Penggunaan Penerimaan Sumber Daya Alam)	EKUITAS
2009	Pengaruh Desentralisasi dan Komitmen Organisasional Terhadap Hubungan Antara Penganggaran Partisipatif dan Kinerja Manajerial Pada Organisasi Pemerintah Daerah	EKUITAS
2007	Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	JAMBSP
2007	Pengaruh Budaya Organisasi, <i>Locus of Control</i> dan Kebijakan Sektor Publik Terhadap Kinerja Aparat Pelayanan Publik UPT Dipenda Bangkalan	JAMBSP
2006	Identifikasi Faktor-Faktor dalam Pengembangan Model Kelembagaan Investasi Terpadu di Provinsi Jawa Timur	EKUITAS

Kegiatan dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan (5 tahun Terakhir).

Jenis Kegiatan	Tempat	Waktu	Sebagai	
			Penyaji	Peserta
Workshop "Politik Anggaran DPRD dalam Menentukan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah"	Hotel Jayakarta - Jakarta	21 s.d. 23 Desember 2011	Penyaji	-
Workshop "Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran"	Hotel Jayakarta - Jakarta	20 s.d. 23 Desember 2011	Penyaji	-
Workshop "Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah"	Hotel Sahid - Surabaya	8 s.d. 10 Desember	Penyaji	-

		2011		
Accounting Research Training Series Volume 2: Metode Riset Kualitatif	Universitas Brawijaya - Malang	7 sd 8 Desember 2011	-	Peserta
Bintek “Implikasi Terbitnya PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”	Hotel Sahid - Surabaya	11 November 2011	Penyaji	-
Workshop “Pembuatan Proposal Hibah Bantuan Dikti Tahun 2012”	STIESIA - Surabaya	23 September 2011	-	Peserta

Jenis Kegiatan	Tempat	Waktu	Sebagai	
			Penyaji	Peserta
Workshop “Optimalisasi Peran Anggota DPRD dalam Pembahasan Perubahan APBD TA 2011”	Hotel Inna Garuda - Yogyakarta	22 sd. 24 Agustus 2011	Penyaji	-
Lokakarya Auditing “Teknik-Teknik Audit Dalam Mendeteksi Kecurangan”	STIESIA - Surabaya	18 Agustus 2011	-	Peserta
Workshop “Pembahasan dan Penetapan Perubahan APBD”	Hotel Mercure - Jakarta	21 s.d. 23 Juli 2011	Penyaji	-
Workshop “Kebijakan Penganggaran Daerah dan Implementasi Permendagri 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011”	Hotel Jayakarta - Bandung	29 Juni s.d. 1 Juli 2011	Penyaji	-
Financial Planning Seminar	STIESIA - Surabaya	23 Juni 2011	-	Peserta
Workshop Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif	STIESIA - Surabaya	10 Juni 2011	-	Peserta
Guest Lecturer Program: Education System in United States of America	STIESIA - Surabaya	19 Mei 2011	-	Peserta
Pengembangan Penelitian: Pendekatan Isu-Isu Akademik dan Isu-Isu Empiris Berbasis Jurnal	STIESIA - Surabaya	7 April 2011	-	Peserta
Konvergensi IFRS: Peningkatan Kualitas Standar Akuntansi Keuangan	STIESIA - Surabaya	23 Maret 2011	-	Peserta
Workshop “Menuju Soliditas, Kredibilitas dan Profesionalisme Anggota Legislatif dalam Hubungan Kelembagaan Pemerintah Daerah”	Hotel Sentral - Jakarta	17 s.d. 20 Maret 2011	Penyaji	-
Workshop “Peningkatan Kapasitas DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”	Hotel Jayakarta - Yogyakarta	3 s.d. 4 Maret 2011	Penyaji	-
Kajian Ilmiah Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik	UPN Veteran - Surabaya	4 Maret 2011	-	Peserta
Debat Epistemologi: Studi atas Manajemen laba dan Corporate Governance	Universitas Brawijaya - Malang	2 Maret 2011	-	Peserta
Workshop “Triple Track Strategy: Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi di Daerah”	Hotel Sahid Raya - Solo	25 s.d. 27 Februari 2011	Penyaji	-
Workshop “Pembangunan Ekonomi yang Pro Job, Pro Poor, dan Pro Growth”	Bali Kuta Resort & Convention Center - Bali	10 s.d. 13 Februari 2011	Penyaji	-
Upaya Peningkatan Rasio Penelitian, Pengabdian	STIESIA -	8 Februari	-	Peserta

Kepada Masyarakat dan Publikasi Internasional	Surabaya	2011		
Pelatihan PSAK Terkini Sesuai Dengan Program Konvergensi IFRS dan Penerapannya	STIESIA - Surabaya	12 sd. 13 Januari 2011	-	Peserta
Workshop “Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)” Materi: Pentingnya Indikator Kinerja dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Hotel Sahid Raya - Yogyakarta	12 s.d. 14 Desember 2010	Penyaji	-

Jenis Kegiatan	Tempat	Waktu	Sebagai	
			Penyaji	Peserta
Workshop “Analisis Trend Pro Poor dan Gender Serta Mekanisme dan Celah Penyimpangan APBD” Materi: Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja	Hotel Sahid Raya - Surakarta	9 s.d. 11 Desember 2010	Penyaji	-
Pelatihan Pengajaran Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis IFRS	FE Univ. Brawijaya Malang	23 s.d. 24 November 2010	-	Peserta
Workshop “Upaya Peningkatan Kualitas Perubahan APBD 2010 dan APBD 2011 dalam Meningkatkan Sinkronisasi Kebijakan dengan Substansi Permasalahan dan Peluang Pembangunan di Daerah” Materi: Pedoman Penyusunan APBD 2010 Berdasarkan Permendagri 37 Tahun 2010	Hotel Sahid Raya - Yogyakarta	22 s.d. 24 Agustus 2010	Penyaji	-
Workshop “Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011” Materi: Klasifikasi Belanja Daerah	Hotel Jayakarta - Jakarta	6 s.d. 8 Agustus 2010	Penyaji	-
Simposium Nasional Keuangan I Tahun 2010 “Penguatan <i>Good Governance Good Governance</i> Dalam Akselerasi Pertumbuhan Perekonomian Pasca Krisis”	STIESIA	29 Juli 2010	-	Reviewer, Moderator dan Peserta
Workshop “Orientasi Tugas DPRD Dalam Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah Serta Pengelolaan dan Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah” Materi: Kebijakan Anggaran Daerah dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	Patra Semarang Convention Hotel	25 sd. 27 Juni 2010	Penyaji	-
Workshop Nasional “Sinkronisasi Pemahaman Legislatif dan Eksekutif dalam Mengkaji Hasil Audit BPK”	Hotel Jayakarta - Jakarta	20 sd. 22 Mei 2010	Penyaji	-
Workshop “Optimalisasi Peran Legislatif dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya” Materi: Kebijakan Anggaran Daerah dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	Garden Palace Hotel Surabaya	22 sd. 24 April 2010	Penyaji	-
Workshop “Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” Materi: LKPJ Kepala Daerah dan Pengawasan Kinerja Pemerintah	Hotel Jayakarta - Jakarta	16 s.d. 18 April 2010	Penyaji	-
Workshop “Peningkatan Kapasitas DPRD dalam	Hotel Inna	19 s.d. 21	Penyaji	-

Kebijakan dan Implementasi Penganggaran Daerah”	Garuda – Yogyakarta	Maret 2010		
Workshop Nasional “Analisis APBD dalam Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal untuk Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah”	Hotel Jayakarta – Jakarta	25 s.d. 28 Februari 2010	Penyaji	-
Workshop Nasional “Peningkatan Kinerja dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tugas DPRD”	Hotel Sahid – Surabaya	4 s.d. 6 Februari 2010	Penyaji	-

Jenis Kegiatan	Tempat	Waktu	Sebagai	
			Penyaji	Peserta
Workshop “Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD dalam Analisa dan Penyusunan APBD”	New Metro Hotel - Semarang	15 s.d. 17 Januari 2010	Penyaji	-
Workshop Nasional “Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal dalam KUA, PPAS dan Analisis Standar Belanja (ASB)”	Hotel Sentral - Jakarta	7 s.d. 9 Desember 2009	Penyaji	-
Seminar Penelitian “Peningkatan Scientific Group Discussion”	STIESIA	24 November 2009	-	Peserta
Seminar “Enhance STIESIA Surabaya to International Educational Standards”	STIESIA	16 s.d. 17 November 2009	-	Peserta
Workshop Nasional “Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal dalam KUA, PPAS dan Analisis Standar Belanja (ASB)”	Hotel Jayakarta - Jakarta	14 s.d. 16 November 2009	Penyaji	-
Simposium Nasional Akuntansi XII	FE Univ. Sriwijaya Palembang	4 s.d. 6 November 2009	-	Peserta
Bimbingan Teknis “Reorientasi Tugas dan Wewenang Anggota DPRD”	Hotel Jayakarta - Jakarta	2 s.d. 4 September 2009	Penyaji	-
Sosialisasi Program Kemahasiswaan	STIESIA	15 Agustus 2009	Penyaji	-
Pelatihan Menyusun Buku Ajar	STIESIA	12 Agustus 2009	-	Peserta
Pelatihan Pasar Bursa Saham	BEI Surabaya	10 s.d. 11 Agustus 2009	-	Peserta
Seminar Nasional “Rejuvenating Our Teaching and Research in Financial Accounting” dan “ Modeling Good Corporate Governance in Indonesia”	FE UGM Yogyakarta	1 s.d. 3 Juli 2009	-	Peserta
Lokakarya “Pembelajaran Inovatif Dalam Rangka Peningkatan Wawasan Tenaga Pengajar”	STIESIA	11 Juni 2009	-	Peserta
Workshop Nasional “Penetapan KUA & PPAS dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010”	Hotel Inna Garuda - Yogyakarta	31 Juli s.d. 1 Agustus 2009	Penyaji	-
Workshop Nasional “Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”	Hotel Sentral - Jakarta	4 s.d. 7 Juni 2009	Penyaji	-
Workshop Nasional “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah”	Grand Wahid Hotel -	19 s.d. 21 April 2009	Penyaji	-

	Salatiga			
Kuliah Umum “Filosofi Ekonomi Syariah dan Implementasinya dalam Menatasi Krisis Keuangan Global”	STIESIA	28 Maret 2008	-	Peserta
Workshop Nasional “Peningkatan Kapasitas DPRD dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Pencermatan LKPJ Kepala Daerah” di Yogyakarta (16 sd 18 Maret 2009)	Hotel Inna Garuda - Yogyakarta	16 s.d. 18 Maret 2009	Penyaji	-

Jenis Kegiatan	Tempat	Waktu	Sebagai	
			Penyaji	Peserta
Seminar Nasional “Kritik atas Epistemologi Islam dan Sains Modern”	PDIA Univ. Brawijaya Malang	10 Maret 2009	-	Peserta
Workshop “Inovasi Pembelajaran dan Assessment”	STIKOMP Surabaya	13 Februari 2009	-	Peserta
Workshop Nasional “Peningkatan Kapasitas DPRD dalam Analisis dan Pembahasan LKPD serta Pengawasan Pembangunan Daerah”	Lor In Hotel - Solo	29 s.d. 31 Januari 2009	Penyaji	-
Workshop “Pengelolaan dan Penyuntingan Jurnal Ilmiah”	STIESIA	29 November 2008	-	Peserta
Workshop “Peningkatan Kemampuan Menulis Artikel Jurnal Ilmiah”	STIESIA	28 November 2008	-	Peserta
PPL Pasar Modal – Forum Akuntan Pasar Modal	IAPI	21 November 2008	-	Peserta
Workshop “Penyusunan Proposal Penelitian”	STIESIA	12 dan 14 November 2008	-	Peserta
Pelatihan Penelitian Kuantitatif	STIESIA	7 dan 11 November 2008	-	Peserta
Pelatihan Penelitian Kuantitatif	STIESIA	5 dan 6 Nov. 2008	-	Peserta
Workshop Nasional “Implementasi Kelayakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pengelolaan Aset dan Investasi Daerah”	Grand Wahid Hotel - Salatiga	1 s.d. 3 September 2008	Penyaji	-
Kegiatan Pengenalan Program Kampus	STIESIA	27 Agustus 2008	Penyaji	-
Seminar Hasil Penelitian	STIESIA	22 Agustus 2008	-	Peserta
Workshop Nasional “Reviu atas Kualitas LKPD dan Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004”	Hotel Sentral - Jakarta	13 s.d. 16 Agustus 2008	Penyaji	-
Workshop Nasional “Memperkuat Kelembagaan Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2009”	Hotel Sentral - Jakarta	31 Juli s.d. 3 Agustus 2008	Penyaji	-
Lokakarya “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Akuntansi Keuangan Daerah	IAPI	25 November 2008	-	Peserta
Seminar Hasil Penelitian	STIESIA	11 Juli 2008	-	Peserta
Workshop Nasional “Memperkuat Kelembagaan Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2009”	Hotel Jayakarta -	25 s.d. 27 Juni 2008	Penyaji	-

	Jakarta			
Workshop Nasional “Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Pengaturan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang Lebih Transparan dan Bertanggungjawab”	Hotel Sahid Raya - Solo	21 s.d. 23 Mei 2008	Penyaji	-
Jenis Kegiatan	Tempat	Waktu	Sebagai	
			Penyaji	Peserta
The Third International Postgraduate Consortium on Accounting – Brawijaya University	Univ. Brawijaya	8 - 9 May 2008	-	Peserta
Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi	STIESIA	17 April 2008	-	Peserta
Workshop Nasional “Penyampaian LKPJ APBD sebagai Amanah UU Nomor 32 Tahun 2008 dan PP Nomor 3 Tahun 2007”	Hotel Inna Garuda - Yogyakarta	12 s.d. 15 April 2008	Penyaji	-
Seminar “Geographical Information System (GIS) of Retail Business”	STIESIA	14 April 2008	-	Peserta
Kuliah Tamu “Marketing Masa Depan”	STIESIA	11 April 2008	-	Peserta
Workshop Nasional “Memperkuat Kelembagaan Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2009 – materi: Akuntabilitas dan Laporan Keuangan Partai Politik”	Hotel Jayakarta - Jakarta	23 s.d. 26 Februari 2008	Penyaji	-
Simposium Nasional Riset dan Kebijakan Ekonomi	Unair	2008	-	Peserta
Workshop Nasional “Sinkronisasi Pembagian Urusan Pemerintah dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam Mengatur Tata Cara Kerjasama Daerah dan Pengelolaan Uang Daerah serta Standar Biaya Tahun 2008”	Hotel Jayakarta – Denpasar Bali	21 s.d. 24 Desember 2007	Penyaji	-
Workshop Nasional “Peningkatan Kapasitas DPRD dalam Penataan Pengelolaan Aset dan Investasi Daerah dengan Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”	Quality Hotel Wahid - Salatiga	24 s.d. 26 November 2007	Penyaji	-
Workshop Nasional “Penetapan KUA dan PPAS dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 dengan Memperhatikan SPM demi Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan Daerah”	Hotel Jayakarta - Jakarta	2 s.d. 5 November 2007	Penyaji	-
Workshop Nasional “Peningkatan Kinerja DPRD dalam Pengelolaan Dana Investasi, Barang dan Keuangan daerah”	Hotel Sahid Raya - Solo	6 s.d. 9 Oktober 2007	Penyaji	-
Workshop Nasional “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Menuju Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa”	Hotel Sentral - Jakarta	4 s.d. 7 Oktober 2007	Penyaji	-

Pengenalan Program Akademik	STIESIA	4 s.d. 5 September 2007	Penyaji	-
Workshop Nasional “Peningkatan Kinerja DPRD dalam Menciptakan Good Governance untuk Mewujudkan Clean Government”	Hotel Kinasih - Bogor	26 s.d. 29 Agustus 2007	Penyaji	-
Workshop Nasional “Peningkatan Kinerja DPRD dalam Menciptakan Good Governance untuk Mewujudkan Clean Government”	Hotel Oasis Amir - Jakarta	23 s.d. 26 Agustus 2007	Penyaji	-
Workshop Nasional “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Menuju Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa”	Hotel Inna Garuda - Yogyakarta	12 s.d. 15 Agustus 2007	Penyaji	-
Kuliah Umum “Riset Ilmiah dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”	STIESIA	12 Juni 2007	-	Peserta
Jenis Kegiatan	Tempat	Waktu	Sebagai	
			Penyaji	Peserta
Workshop Nasional “Peningkatan Kinerja DPRD dalam Pengelolaan Dana Investasi, Barang dan Keuangan daerah”	Hotel Sahid Raya - Solo	13 s.d. 16 Mei 2007	Penyaji	-
Dialog Interaktif “Profesionalisme Melalui Sertifikasi sebagai Uapaya Peningkatan Mutu, Kompetensi, Jumlah dan Kesejahteraan Guru/Dosen”	Unair	28 April 2007	-	Peserta
Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik	UPN “Veteran” Jawa Timur	25 s.d. 26 April 2007	-	Peserta
Pelatihan Sistem Perbankan	Univ. Merdeka Malang	22 April 2007	-	Peserta
Workshop Nasional “Sistem Informasi Keuangan Daerah”	Hotel Sentral - Jakarta	19 s.d. 22 April 2007	Penyaji	-
Kuliah Tamu “Sistem Ekonomi Islam”	STIESIA	28 Maret 2007	-	Peserta
Seminar “Teknik Penulisan Artikel Ilmiah dan Kebijakan Pengelolaan Jurnal”	STIESIA	23 Maret 2007	-	Peserta
Seminar Hasil Penelitian	STIESIA	9 Maret 2007	-	Peserta
Seminar Hasil Penelitian	STIESIA	14 Desember 2006	-	Peserta
Pengenalan Program Akademik	STIESIA	5 s.d. 7 September 2006	Penyaji	-
Kuliah Umum “Metode Penelitian Bidang Akuntansi	STIESIA	21 Juli 2006	-	Peserta

dan Manajemen”				
Seminar Nasional “Reformasi Akuntansi Sektor Publik Pasca Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005”	STIESIA	3 Juni 2006	Moderator	-
Temu Nasional FD-ASP dan Workshop Metode & Materi Pengajaran Akuntansi Sektor Publik	Univ. Muh Malang	19 s.d. 20 Mei 2006	-	Peserta
Seminar Hasil Penelitian	STIESIA	18 Februari 2006	Penyaji	-

Pengabdian Kepada Masyarakat yang pernah dilakukan dan pernah dipublikasikan (3 tahun terakhir)

Tahun	Jenis Kegiatan	Sebagai	Tempat	Waktu
2010	Pendampingan Proses Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pemilu Kada dan Wakada Kabupaten Jember	Konsultan	KPU Kabupaten Jember	Maret s.d. Agustus 2010
2009	Pelatihan Manajemen Produksi dan Manajemen Pemasaran bagi Mitra Binaan PT. Pupuk Kaltim Dep. PKBL Cab. Kalsel	Instruktur	Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan	25 s.d. 27 Mei 2009

Tahun	Jenis Kegiatan	Sebagai	Tempat	Waktu
2008	Pelatihan Kewirausahaan, Pemasaran dan Pembukuan Bagi Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Magetan	Instruktur	Kantor Koperasi, UKM Kab Magetan	9 April 2008
2007	Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Mitra Binaan PT. Pupuk Kaltim Dep. PKBL Cab. Kalsel	Instruktur	Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan	18 s.d. 22 Juni 2007
2007	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Manajemen Usaha Kecil bagi Mitra Binaan PT. PKBL PT. PG Rajawali – I Surabaya	Instruktur	Grand Trawas Hotel	1 s.d. 3 Mei 2007
2006	Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Mitra Binaan PT. Pupuk Kaltim Dep. PKBL Cab. Kalsel	Instruktur	Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan	3 s.d. 7 Juli 2006
2006	Pelatihan Kewirausahaan bagi Mitra Binaan PT. Pupuk Kaltim Dep. PKBL Cab. Kalsel	Instruktur	Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalsel	17 s.d. 21 Juli 2006
2006	Pelatihan Akuntansi bagi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Jombang	Instruktur	Kabupaten Jombang	18 Mei 2006
2006	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi dan Kewirausahaan	Instruktur	STIESIA	14 Maret 2006

PERNYATAAN PENULIS

Kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel yang kami ajukan untuk Simposium Nasional Akuntansi XV dengan judul:

INDEPENDENSI AUDITOR BERBASIS KULTUR DAN FILSAFAT HERBERT BLUMMER

Tidak dikirimkan dan tidak dipublikasikan dalam jurnal lainnya baik nasional maupun internasional.

Apabila kami melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini kami menyatakan menarik artikel yang kami ajukan. Bila kemungkinan terbukti bahwa kami ternyata melakukan tindakan mengirimkan atau mempublikasikan artikel kami dalam jurnal lainnya, berarti artikel yang kami kirimkan ini dapat dibatalkan dalam Simposium Nasional Akuntansi XV.

Surabaya, Juni 2012
Penulis,

Indriya Kalana
Sutjipto Ngumar
Ikhsan Budi R.